

STRATEGI PENYULUHAN DALAM MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Muhammad Yusuf

Prodi Doktor Administrasi Publik, Universitas Negeri Makassar

Abstrak

Keberadaan penyuluh perikanan yang produktif dan mandiri sangat dibutuhkan dalam membangun potensi masyarakat di bidang perikanan. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kajian pustaka atau library research. Metode pengumpulan data diambil dari sumber data. Adapun data diperoleh melalui sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis isi (content analysis) yaitu pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak di bahan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Untuk mewujudkan Pembinaan dan Pendampingan Pelaku utama/pelaku usaha yang terukur dan terarah maka diperlukan konsep Strategi Penyuluhan Sektor Kelautan dan Perikanan yang relevan dengan kondisi saat ini.

Kata Kunci: *Strategi; Penyuluhan; Produktif; Mandiri.*

PENDAHULUAN

Potensi sumber daya alam di Indonesia khususnya sektor kelautan dan perikanan sangat berlimpah dan menjanjikan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kelautan dan Perikanan, sehingga perlu formulasi perencanaan yang terintegrasi dan holistik berdasarkan kriteria dan geografis wilayah sasaran program kementerian kelautan dan perikanan yang mengacu pada Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yakni “Mewujudkan Sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional”. Hal ini didukung dengan kekuatan SDM kompeten, dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata.

Dinamika pembangunan di Indonesia memasuki era yang penuh dengan kompleksitas, hampir semua sektor pembangunan mengalami berbagai perubahan positif dan negatif dalam aspek

hidup dan Kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Salah satu sektor paling unik yang menjadi fokus perhatian adalah kelautan dan perikanan, sebab sektor ini memiliki karakteristik bervariasi dan komoditas yang sangat beragam. Di dalam pengelolaannya terkendala dengan persoalan mendasar dan perlu formulasi perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi. Memasuki era digitalisasi saat ini, di segala aspek kehidupan manusia khususnya di sektor kelautan dan perikanan mendorong pemerintah pusat dalam hal ini kementerian kelautan dan perikanan perlu untuk mendesign kebijakan dan program prioritas yang terukur, terintegrasi dan tepat sasaran bagi pelaku utama/pelaku usaha, masyarakat pesisir dan stakeholder terkait lainnya. Salah satu kebijakan yang perlu diimplementasikan adalah kebijakan penciptaan iklim usaha yang kondusif. Digitalisasi sektor kelautan dan perikanan perlu mendapat perhatian khusus melalui pendampingan kepada pelaku utama dan pelaku usaha secara konsisten dan

berkelanjutan, sehingga tujuan digitalisasi mampu menekankan transparansi, efisiensi waktu dan biaya, serta dapat meningkatkan produksi dan nilai tambah Produk perikanan nasional yang berdaya saing.

Kebijakan dan program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ada tersebar di Kabupaten/Kota di Indonesia diharapkan dapat menjadi media untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan dalam mewujudkan kemandirian Ekonomi bagi masyarakat sasaran. Implementasi kebijakan strategis dan program Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut, melalui badan riset dan sumber daya manusia KP menempatkan dan mengelola tenaga penyuluh perikanan sebagai ujung tombak atau garda terdepan dalam pengawalan kebijakan dan program yang dicanangkan.

Menurut (Jumain, Hadijah 2018) keberadaan penyuluh perikanan yang mandiri dan profesional sangat dibutuhkan dalam membangun potensi masyarakat di bidang perikanan. Lebih lanjut, peran penyuluh perikanan yang kompeten sangat diperlukan bagi pengembangan mutu pelaku utama dan usaha (Amanah 2008). Untuk mencapai tujuan pembangunan kelautan dan perikanan, pengembangan sumberdaya manusia merupakan faktor kunci yang harus diperhatikan. Salah satu upaya dalam mewujudkan hal tersebut adalah melalui pengembangan program kegiatan penyuluhan perikanan (Jumiati 2019). Lebih lanjut, Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan multimedia yang begitu cepat, penyuluh perikanan dituntut untuk memahami teknologi informasi (Nila Sylvi Ratnadila, Andin H. Taryoto 2019).

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya

dalam suatu sistem (Astuti 2015). Peran Penyuluhan Perikanan merupakan salah satu kelembagaan penyuluhan yang memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan perikanan di lapangan (Maryam 2018). Sejalan dengan itu, penyuluh perikanan merupakan profesi sangat mulia karena dapat merubah perilaku, sikap dan keterampilan pelaku utama/pelaku usaha agar usahanya sukses. jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk penyuluhan perikanan yang diduduki oleh PNS dan Non PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh yg diberikan oleh pejabat yang berwenang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kajian pustaka atau library research. Metode pengumpulan data diambil dari sumber data. Adapun data diperoleh melalui sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis isi (content analysis) yaitu pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak di bahan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan fungsi sistem penyuluhan termaktub dalam Pasal 4, memiliki 7 fungsi dan tugas pokok Penyuluh Perikanan sebagai berikut:

1. Memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha;
2. Mengupayakan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, dan sumberdaya lainnya agar mereka dapat mengembangkan usahanya.

3. Meningkatkan kemampuan kepemimpinan, manajerial, dan kewirausahaan pelaku utama dan pelaku usaha.
4. Membantu pelaku utama dan pelaku usaha dalam menumbuhkembangkan organisasinya menjadi organisasi ekonomi yang berdaya saing tinggi, produktif, menerapkan tata kelola berusaha yang baik, dan berkelanjutan.
5. Membantu menganalisis dan memecahkan masalah serta merespon peluang dan tantangan yang dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha dalam mengelola usaha.
6. Menumbuhkembangkan kesadaran pelaku utama dan pelaku usaha terhadap kelestarian fungsi lingkungan.
7. Melembagakan nilai-nilai budaya pembangunan perikanan yang maju dan modern bagi pelaku utama secara berkelanjutan.

Sementara penyuluhan perikanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong serta mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha, dan pendapatan. Sehingga dalam konteks pembinaan dan pendampingan pelaku utama dan pelaku usaha sektor KP melalui penyuluhan perlu design Tujuan dan Strategi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan secara Komprehensif dalam mendukung Visi dan Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan guna terwujudnya Masyarakat Mandiri dan Sejahtera. Makna Strategi Penyuluhan Perikanan adalah langkah-langkah atau cara untuk mencapai suatu

tujuan penyelenggaraan penyuluhan perikanan. Langkah-langkah yang diambil tentu dapat berdampak baik kepada iklim usaha Pelaku Utama Perikanan. Pelaku Utama Perikanan adalah nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemasar ikan, pengolah garam, dan pengelola konservasi beserta keluarga intinya.

Untuk mewujudkan Pembinaan dan Pendampingan Pelaku utama/pelaku usaha yang terukur dan terarah maka diperlukan konsep Strategi Penyuluhan Sektor Kelautan dan Perikanan yang relevan dengan kondisi saat ini sebagai berikut :

1. Tujuan
 - a. Memberikan kepastian arah bagi terselenggaranya penyuluhan yang produktif, partisipatif, berwawasan luas;
 - b. Mewujudkan Penyuluhan Perikanan yang maju dan modern dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan;
 - c. Memberdayakan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam peningkatan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif;
2. Arah
 - a. Arah strategi penyuluhan ini untuk mendukung program prioritas KKP;
3. Program Kegiatan
 - a. Program kegiatan adalah program kegiatan eselon I KKP yang memerlukan pendampingan Penyuluh Perikanan.
4. Penempatan ketenagaan
 - a. Penempatan penyuluh perikanan pendekatannya berdasarkan potensi wilayah perikanan dengan mempertimbangkan jumlah pelaku utama/Pelaku usaha
5. Strategi penyuluhan Sektor kelautan dan perikanan dapat melalui:

a. Penataan dan peningkatan kapasitas kelembagaan Penyuluhan Perikanan

- Membentuk kelembagaan penyuluhan di 34 provinsi untuk mempermudah koordinasi, pengawasan dan memperpendek rentang kendali.
- Peningkatan sinergitas antara kelembagaan penyuluhan pemerintah dengan Dinas yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
- Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan Pelaku Utama/Pelaku Usaha perikanan.
- mendorong dan memfasilitasi UMKM berbadan hukum.

b. Peningkatan kuantitas dan kompetensi ketenagaan penyuluh perikanan

- Peningkatan kuantitas penyuluh perikanan;
- Peningkatan kompetensi penyuluh perikanan;
- Peningkatan koordinasi antar penyuluh;

c. Penguatan dan penataan sistem penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan

- Penyusunan program penyuluhan perikanan;
- Pemilihan metode penyuluhan perikanan yang tepat;
- Penataan materi penyuluhan perikanan berdasarkan kebutuhan;
- Pengembangan kerjasama penyelenggaraan penyuluhan lintas sub sektor;

d. Peningkatan kapasitas dan kelembagaan Pelaku Utama serta Pelaku Usaha

- Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan Pelaku Utama;
- Penyebaran kelembagaan ekonomi Pelaku Utama;
- Pemberian penghargaan bagi kelompok Pelaku Utama dan kelembagaan ekonomi Pelaku Usaha berprestasi;
- Penumbuhan dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk menjadi penyuluh swadaya dan mendorong motivasi swasta untuk turut berperan aktif dalam penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif;
- Pengembangan kerjasama penyelenggaraan penyuluhan lintas sub sektor;

e. Peningkatan dukungan sarana, prasarana, dan pembiayaan Penyuluhan Perikanan

- Pengembangan sarana dan prasarana Penyuluhan Perikanan untuk meningkatkan produktivitas penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan yang efektif dan efisien, serta mendukung upaya peningkatan kemandirian masyarakat.
- Penyediaan sarana Penyuluhan Perikanan berdasarkan karakteristik wilayah kerja penyuluhan.
- Pemenuhan kebutuhan prasarana Penyuluhan Perikanan secara bertahap.

- Pemenuhan pembiayaan penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan yang memadai
6. Peningkatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penyuluhan Perikanan meliputi:
 - a. Pembinaan Penyuluhan Perikanan yang berkesinambungan dan komprehensif.
 - b. Pemenuhan pengawasan Penyuluhan Perikanan yang berkesinambungan.
 - c. Evaluasi kinerja Penyuluh Perikanan secara periodik
 7. Pengutamaan prinsip kemitraan dalam pengembangan kelembagaan Penyuluhan Perikanan, Pelaku Utama, dan Pelaku Usaha meliputi:
 - a. Pembangunan jejaring antar penyuluh perikanan dengan kelompok, gabungan kelompok, dan asosiasi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha
 - b. Penumbuhan dan pengembangan kapasitas kemampuan kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha melalui studi banding dan permagangan
 - c. Peningkatan kemandirian kelompok Pelaku Utama dan Pelaku Usaha dalam mengakses permodalan usaha kelautan dan perikanan
 - d. pembangunan forum-forum pertemuan untuk produk kelompok dan dikembangkan secara lokal, regional, nasional, dan internasional
 - e. pengembangan bentuk pasar berjangka kelautan dan perikanan, guna menentukan dan memastikan harga

Dengan design sistem Penyuluhan KP yang komprehensif diharapkan mampu menjadi Role model Pembinaan dan pendampingan pelaku utama dan usaha sektor Kelautan dan Perikanan yang menjadi Binaan para Penyuluh Perikanan yang berjumlah sekitar 5.959 orang terdiri dari Penyuluh Perikanan PNS dan Non PNS yang tersebar di 476 Kabupaten/Kota di Indonesia dibawah Naungan 9 Satuan Pangkal Administrasi terdiri dari Satminkal Bogor, Banyuwangi, Tegal, Gondol, Medan, Ambon, Maros, Bitung dan Palembang dalam mengawal kebijakan dan Program Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan Indonesia Maju dan Mandiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka keberadaan penyuluh perikanan sangat penting dalam mendukung pembangunan di bidang perikanan. Oleh karena itu perlu dikembangkan strategi pengembangan SDM penyuluh perikanan agar mampu produktif dan mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanah, Siti. 2008. “Sistem Penyuluhan Perikanan Dalam Mengantisipasi Era Perubahan.” *Jurnal Penyuluhan* 4(2): 140–51.
- Astuti, Indri Widhi. 2015. “Peran Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Dalam Peningkatan Produktivitas Pertanian Di Desa Batu Timbau Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur.” *e Journal Ilmu Pemerintahan* 3(1): 433–42.
- Jumain, Hadijah, Sri Mulyani. 2018. “Peranan Penyuluh Perikanan Untuk Meningkatkan Pembudidaya Tambak Di Kabupaten Sinjai.” *Journal Of*

Aquac Environment 1(1): 15–24.

Jumiati, Muhammad Zainuddin. 2019. “Analisis Penyelenggaraan Penyuluhan Dalam Pemberdayaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.” *Pena Akuatika* 18(2): 13–22.

Maryam, Sitti. 2018. “Kinerja Penyuluh Pertanian Pada Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan Dan Kehutanan Kecamatan Siniu Kabupaten Parigi Moutong.” *Katalogis* 6(6): 115–25.

Nila Sylvi Ratnadila, Andin H. Taryoto, Ani Leilani. 2019. “Pemanfaatan Media Teknologi Informasi Dalam Penyelenggaraan Penyuluhan Perikanan (Kasus Penyuluh Perikanan Kabupaten Tabanan Provinsi Bali).” *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan* 13(2): 189–204.